

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016**



**KEPALA DESA KECAMATAN KALIGONDANG
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2016, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.

Kepala Desa

Arif, S.Kom

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. TUJUAN	1
B. VISI MISI	2
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	2
II. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	
2.1 PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
2.2 PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	
2.3 PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
2.4 PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
2.5 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	
A. PERDES TENTANG APBDESA T.A 2016	
B. PERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA TA 2016	
2.6 KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI	
III. PENUTUP	
A. KESIMPULAN	
B. SARAN	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 (Format A.1)</i>	
2. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 (Format A.2)</i>	
3. <i>Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 (Form. B)</i>	
4. <i>Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)</i>	
5. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)</i>	
6. <i>Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)</i>	
7. <i>Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)</i>	
8. <i>Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember 2016</i>	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

1.2 VISI DAN MISI

Visi Desa “.....”

1. Kemandirian yang diartikan bahwa Desa memiliki sumber daya manusia masyarakat berdemokrasi, akses pendidikan, sumber daya kelembagaan desa, ada daya pertisipasi /gotong royong, sumber daya alam, sumber daya keagamaan dan kerajinan lokal yang mampu dikelola secara mandiri.
2. Pusat pertumbuhan adalah pemerintahan berbasis sumber daya manusia, Ekonomi, pertanian/perkebunan, peternakan, kearifan lokal yang dalam proses kebijakan keberlanjutan dan menitikberatkan menyebarluaskan pusat pertumbuhan akan kesejahteraan produktif dan berkelanjutan.

Misi Desa

Adapun Misi Desa adalah

Program Fisik:

1. Pengembangan dan peningkatan sarana jalan yang menunjang transportasi, baik jalur pertanian perkebunan warga dan lintas Desa.
2. Membangun Sarana olah raga yang layak bagi generasi muda terutama volley dan takrow
3. Peningkatan sarana pelayanan dasar Desa
4. Fasilitas pengadaan pupuk bagi petani
5. Penyusunan Perencanaan Desa secara parsipatif

Program Non Fisik:

1. Menciptakan ap[arat pemerintahan yang profesional demi mewujudkan pelayanan yang maksimal

2. Mendorong lembaga yang ada di Desa dalam peningkatan Kapasitas, penyiapan fasilitas dan pengelolaan biaya operasional kelembagaanya.
3. Fasilitasi Beasiswa anak sekolah ,SD,SLTP,SLTA bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi.
4. Meningkatkan kapasitas kelompok PKK dan Majelis Ta,lim
5. Membina kelompok Tani dan peternak dalam pengelolaan pertanian dan peternakan

1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Hasil analisa oleh tim perumus bersama dengan Pemerintah Desa kelembagaan desa serta Masyarakat Desa pada umumnya telah menghasilkan rumusan yang mana rumusan tersebut didapatkan dari hasil pengkajian desa dimulai dari menjangring aspirasi masyarakat mulai dari level paling rendah (Buruh, Tani) sampai pada tingkatan paling atas yaitu hasil identifikasi dan sinkronisasi dari Rencana jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalinggaserta penjabaran Visi Misi Desa .Dari hasil pengkajian Desa tersebut didapatkan masalah utama atau isu strategis dalam pelaksanaan pembngunan yang dilakukan Oleh Desa adalah :

- a. Belum memadainya sarana prasarana Desa seperti inprastruktur jalan, pendidikan maupun ekonomi, kesehatan dan komunikasi.
- b. Masih rendahnya Kapasitas perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- c. Peningkatan kelembagaan Ekonomi Desa
- d. Kapasitas Kelembagaan Desa Masih Rendah
- e. Belum ada fasilitas akses informasi Desa berbasis Teknologi
- f. Terbatasnya pembinaan generasi muda Desa
- g. Tingkat penyerapan tenaga kerja masih sangat rendah
- h. Tidak tersedianya tenaga kesehatan yang berdomisili di Desa serta inprastruktur kesehatan masih belum tersedia.
- i. Masyarakat sangat kesulitan akses air bersih pada saat musim kemarau
- j. Kesejahteraan Masyarakat masih sangat rendah.
- k. Kapasitas Aparat masih sangat rendah
- l. Pememfaatan irigasi Desa belum maksimal
- m. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

II.1. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat
2. Kegiatan oprasional perkantoran
3. Kegiatan Oprasional BPD
4. Pembangunan Batas Dusun
5. Pembuatan Batas Desa
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
7. Pembuatan PERDES (Aset Desa, Kelembagaan, dan Tupoksi Aparat Desa)
8. Musyawarah Desa Pertanggung jawaban Kpl. Desa
9. Musyawarah Penataan Desa
10. Musdus
11. Rapat Koordinasi
12. Musyawarah Desa
13. Musrenbang
14. Musyawarah Kerja sama Desa
15. Musyawarah Penetapan aset Desa
16. Musyawarah kejadian Luar Biasa
17. Pembuatan Profil Desa
18. Pengadaan Laptop/printer kantor Desa dan BPD
19. Pengadaan Baju aparat dan Lembaga Desa
20. Pembuatan papan informasi Pengelolaan anggaran Desa
21. Pembuatan Website Desa
22. Pelatihan mengelola website Desa
23. Pengadaan Jaringan MI-FI
24. Pembiayaan Jaringan Wi-fi/bulan
25. Insentif Guru Mengaji dan Imam Desa/Dusun
26. Lokakarya Sejarah Desa
27. Peningkatan insentif aparat Desa
28. Pembuatan RKPDes
29. Insentif Penyusun Perencanaan
30. Penyusunan RAPBDes
31. Pembiayaan Administrasi Desa
32. Papan struktur Desa/Lembaga
33. Pemeliharaan Kantor Desa
34. Pengadaan Kamera
35. Fasilitas Penerbitan Akta Nikah
36. Pengadaan Alat GPS

37. Pengadaan Kendaraan Oprasional
38. Pengadaan Insentif Pengelol air
39. Pengadaan ATK dan mobiler Setiap lembaga

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat
2. Kegiatan oprasional perkantoran
3. Kegiatan Oprasional BPD
4. Pembuatan RKPDes

II.2. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:

1. Perbaikan Jalan/Pengaspalan
2. Pembuatan Warkop Desa
3. Pembangunan Sarana Air bersih
4. Talud
5. Pembangunan Drainase
6. Pembangunan gedung dan Rehab Kantor Desa
7. Rabat Beton
8. Hutan Jalur
9. Pembangunan GOR
10. Pengadaan Neon box
11. Trotoar
12. Pengadaan Lahan penguburan
13. Perintisan Jalan Tani
14. Pengadaan Lampu jalan
15. Beda Rumah tidak layak huni
16. Pustu
17. Bantuan kilometer Listrik
18. Pagar Desa
19. Rehab TK
20. Pembangunan TK paud
21. Pembangunan ruang KTI, BUMDes, LPM, BABINSA, DAN BABINKANTIMAS
22. Pengadaan Posyandu
23. Pengadaan Taman Baca
24. Pembuatan Empan Desa
25. Bantuan Bibit Ikan Nila
26. Pembuatan Sumur Embun

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana Air bersih

II.3. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Evaluasi kinerja Kelembagaan
2. Pengadaan Insentif tim revisi RPJMDes
3. Insentif petugas kebersihan lingkungan
4. Insentif Muadzin
5. Revitalisasi Pengurus GAPOKTAN
6. Pengadaan Insentif Pengurus BUMDES
7. Pengadaan Insentif pengurus BKR
8. Penambahan Operasional LPM
9. Pembuatan Perdes BPD
10. Operasional Monitoring BPD
11. Pelatihan Penguatan kapasitas pengurus Kelompok Tani
12. Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD
13. Pemilihan Pengurus Kelembagaan
14. Bantuan logistik untuk korban kebakaran
15. Rehabilitasi Masjid
16. Pemberian Bantuan Tunai kepada Lansia yang kurang mampu
17. Sosialisasi peningkatan Moral anak
18. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar besar agama Islam
19. Sosialisasi keluarga sadar hukum
20. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Remaja Masjid
21. Festival anak Shaleh
22. Peningkatan Kapasitas Majelis Ta'lim
23. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok KADARKUM
24. Perayaan Hari Kemerdekaan RI
25. Perayaan Hari Jadi Desa
26. Kegiatan safari ramadhan
27. Pembinaan masyarakat lansia dan DEFABEL
28. Pembinaan ketentraman dan ketertiban

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Insentif petugas kebersihan lingkungan
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
3. Kegiatan Keagamaan
4. Kegiatan Pembinaan PKK
5. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna
6. Kegiatan fasilitasi & Motifasi terhadap pelajar siswa
7. Kegiatan fasilitasi olahraga dan kepemudaan

II.4. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pelatihan Peningkatan kapasitas pengelola Hutan Desa dan Leba Madu
2. Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos dan Bokasi
3. Pelatihan pembuatan dan pemanfaatan teknologi pupuk Organik dan Pestisida nabati
4. Pelatihan Manajemen Keuangan Desa
5. Pelatihan Pengolahan Administrasi Desa
6. Sosialisasi pelayanan kesehatan
7. Penyuluhan Manfaat ASI Eksklusif
8. Penyuluhan DBD
9. Sosialisasi peraturan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perdagangan orang (trafficking), Narkoba dan HIV/AIDS
10. Sosialisasi rumah sehat dan layak huni
11. Penyuluhan Kelas Ibu Hamil
12. Sosialisasi Dasa Wisma
13. Penyuluhan PHBS
14. Pelatihan Peningkatan kapasitas kader Posyandu
15. Sosialisasi dan Pembinaan Pola Asuh bagi anak
16. Sosialisasi Pemanfaatan pekarangan untuk TOGA
17. Sosialisasi Penyakit ISPA/SARIS
18. TOT (Training Of Trainer)
19. Sosialisasi 10 Program PKK
20. Sosialisasi penggunaan Pestisida Tepat Guna
21. Sosialisasi KADARZI (Keluarga sadar Gizi) dan Pengolahan makanan berimbang dan bergizi
22. Penyuluhan tentang pengolahan pangan yang bermutu, sehat dan aman
23. Penyuluhan tentang perilaku berbusana yang sesuai dengan pribadi, agama dan moral budaya bangsa
24. pelatihan kader tehnik
25. Bantuan oprasional TK
26. Perlombaan penataan halaman sekolah
27. Bantuan bencana alam

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparat
2. Kegiatan pengembangan kapasitas pengurus BUM Desa

II.5. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Dijabarkan keperaturan kepala Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah dirubah keperaturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016, dengan rincian terlampir pada format B

II.6. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa dapat diurai dalam tabel di bawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/UPAYA YANG DITEMPUH
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan Realisasi PBB 3. Penataan rencana pembangunan Desa	1. Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa 2. Minimnya kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB	1. Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan 2. Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana air bersih 2. Kinerja pengelola sarana air bersih belum maksimal	1. Menertibkan petugas air bersih secara maksimal 2. Perlu revitalisasi pengurus sarana air bersih

3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Penataan Pos keamanan 2. Terciptanya keindahan dan kebersihan lingkungan 3. Meningkatnya pemahaman agama 4. Terwujudnya santri dan santriwati yang mahir dalam baca Tulis Al-Quran 5. meningkatnya kesejahteraan kader posyandu	1. Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan	1. Penertiban pemaanfaat Pos kemanan 2. Sosialisasi kebersihan lingkungan dari pemerintah Desa
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Terwujudnya keindahan dan kebersihan kantor 2. Ditetapkannya pengurus Bumdes yang baru 3. Peningkatan SDM melalui pelatihan	1. Petugas kebersihan masih perlu pembinaan dalam kesadaran kebersihan kantor 2. pengurus Bumdes baru masih membutuhkan data dan informasi dari pengurus Bumdes sebelumnya 3. Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningkatan SDM	1. Pembinaan dan perhatian khusus petugas kebersihan kantor 2. Mengadakan pertemuan pengurus Bumdes lama dan pengurus Bumdes Baru 3. Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 “*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*”.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah bagian terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program Kegiatan Desa tahun anggaran 2016 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa

B. UCAPAN TERIMAKASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2016. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Staf Desa, dan terkhusus kepada BPD.

C. SARAN

1. Seiring dengan keinginan pemerintah dalam hal ini mentri Desa dan mentri keuangan, menginginkan Desa cermat dan cepat dalam penyerapan Anggaran. Oleh karena itu kami menyarankan agar pemerintah kabupaten tidak lambat dalam hal penetapan pagu anggaran, agar Desa bisa cepat menyelesaikan perancangan pembangunan untuk tahun berikutnya.
2. Pada tahun ini program perencanaan kami tidak terealisasi 100%, itu disebabkan adanya keterlambatan pencairan dan tidak terealisasinya anggaran sesuai pagu yang dikeluarkan pemerintah kabupaten terkhusus pajak dan retribusi kabupaten. Untuk tahun berikutnya, kami menyarankan agar penetapan serta realisasi pagu yang sesuai.
3. Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2016 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

.....,
KEPALA DESA

.....

LAMPIRAN -LAMPIRAN

LAMPIRKAN DOKUMEN SESUAI PERMENDAGRI 46 2016